

MEMBINGKAI KEBIJAKAN PSBB: ANTARA KEBEBASAN PERS DAN KONTROL PEMERINTAH

by Perpustakaan Pusat UP

Submission date: 01-Dec-2023 09:41AM (UTC+0700)

Submission ID: 2239467690

File name: Membingkai_Kebijakan_PSBB_INSANI.docx (213.29K)

Word count: 4426

Character count: 30427

MEMBINGKAI KEBIJAKAN PSBB: ANTARA KEBEBASAN PERS DAN KONTROL PEMERINTAH

Diana Anggraeni¹, Naila Qonita², Nabila³

^{1,2,3}Universitas Pancasila, Jakarta

diananggraeni@univpancasila.ac.id

ABSTRACT (*bahasa Inggris, Times New Roman 12, bold, miring*)

This study investigates the approach adopted by Kompas.com to navigate the delicate balance between press freedom and government control in Indonesia. Employing a qualitative methodology based on framing analysis components developed by Robert N. Entman, the research scrutinizes 237 news stories featured on the Kompas.com portal, identifying discernible patterns. Utilizing Entman's framing analysis, the study seeks to comprehend how Kompas.com conveys information about the PSBB (Large-Scale Social Restrictions) and presents potential solutions to this issue. The analysis reveals that the Government is prominently featured as the primary news source in 83.05% of cases, encompassing 197 news stories, while NGOs (1.265%), experts (7.59%), and communities (8.01%) are introduced to provide limited alternative perspectives. Kompas.com tends to employ a positive framing approach, skillfully balancing the delivery of accurate information, endorsement of government policies, and avoidance of potential conflicts. The exercise of press freedom, shaped by considerations of political and social factors, reflects the intricate nature of the media-government relationship in Indonesia.

Keywords: Robert Entman's framing analysis, COVID-19, social restrictions, media, press freedom

ABSTRAK

Penelitian ini menggali pendekatan Kompas.com dalam menyeimbangkan kebebasan pers di Indonesia dalam kendali pemerintah. Dengan pendekatan kualitatif menggunakan komponen analisis framing dari Robert N. Entman, sebanyak 237 berita pada portal Kompas.com dikaji dan ditemukan polanya. Analisis framing Robert N. Entman digunakan untuk memahami bagaimana Kompas.com memberikan pemahaman kepada pembaca tentang PSBB dan bagaimana mereka menyajikan solusi terkait isu ini. Pembungkai menyoroiti Pemerintah sebagai sumber berita utama (83,05%) atau sebanyak 197 berita, sedangkan LSM (1, 265%), ahli (7,59%), dan komunitas masyarakat (8,01%) disajikan untuk mengangkat perspektif yang berbeda secara terbatas. Kompas.com cenderung memberikan pembungkai yang positif dan menjaga keseimbangan antara memberikan informasi yang akurat, mendukung kebijakan pemerintah, dan menghindari konflik. Kebebasan pers yang dijalankan dengan pertimbangan faktor politik dan sosial merupakan cerminan kompleksitas hubungan antara media dan pemerintah di Indonesia.

Kata kunci: analisis framing Robert Entman, COVID-19, pembatasan sosial, media, kebebasan pers

PENDAHULUAN

Hubungan antara pemerintah dan media di Indonesia, terus berkembang hingga kini. Pada tahun 1965 hingga 1998, media dibatasi oleh dominasi pemerintahan otoriter. Penyensoran, intimidasi, dan kekerasan terhadap jurnalis masih mewarnai lanskap media Indonesia, meskipun Indonesia telah beralih ke sistem yang lebih demokratis. Hal ini menunjukkan masih adanya pengaruh pemerintah terhadap media (*Indonesia Events of 2020, 2021*). Pada akhir era reformasi, keberagaman lanskap media di Indonesia dipengaruhi oleh tumbuhnya media digital dan outlet berita independen, serta berkembangnya kebebasan pers. Kompleksitas hubungan antara pemerintah dan media Indonesia selalu berkaitan dengan kontrol pemerintah dan kebebasan media (Junius *et al.*, 2022).

Bagaimana media membingkai kebijakan pemerintah, terutama dalam hal kebijakan menjaga jarak fisik selama pandemi COVID-19, adalah faktor kritis yang memengaruhi opini publik (Benecke, 2021), dan sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tersebut (Adi & Stoeckle, 2021). Banyak faktor yang perlu diselidiki lebih lanjut mengenai bagaimana masyarakat mempersepsikan kebijakan pemerintah dan dampak potensialnya setelah diterapkan. Oleh karena itu, media harus bertanggung jawab untuk menyajikan liputan yang akurat dan adil. Pemahaman yang kuat tentang fungsi pembingkai (*framing*) media sangat penting untuk menonjolkan evaluasi kritis pada peliputan berita, yang berdampak baik bagi publik maupun organisasi media (Moernaut et al., 2019).

Kompas.com sebagai salah satu portal berita online utama di Indonesia, termasuk ke dalam portal berita yang berpengaruh terhadap tersampainya berita dan informasi bagi masyarakat Indonesia (Kusnadi & Hikmawan, 2020). Kompas.com, sebagai salah satu portal berita online utama di Indonesia, termasuk ke dalam portal berita yang berpengaruh terhadap tersampainya berita dan informasi bagi masyarakat Indonesia. Kompas.com disukai oleh mayoritas audiens muda Indonesia karena pelaporannya yang kredibel dan netral, yang mencakup beragam topik seperti politik, bisnis, olahraga, teknologi, dan hiburan. Sebagaimana media populer lainnya, Kompas.com juga berupaya untuk menyajikan pelaporan yang netral dan obyektif, melaporkan fakta dengan akurat, serta memberikan konteks untuk membantu pembaca memahami peristiwa dan isu yang dilaporkan.

Penelitian ini mengeksplorasi pendekatan Kompas.com dalam menyeimbangkan kebebasan pers di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah. Hubungan antara pemerintah dan media baru-baru ini semakin kompleks sebagai akibat pertumbuhan media digital dan outlet berita independen. Analisis *framing* Robert Entman digunakan untuk mengkaji topik atau peristiwa yang digambarkan dalam berita. Pendekatan Entman juga digunakan untuk melihat pola, tren, dan bias dalam liputan berita, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana media berita memengaruhi opini publik dan bagaimana topik-topik penting disajikan. Fokus dari studi ini adalah untuk memahami bagaimana Kompas.com mengelola pengaruh pemerintah terhadap independensi media dalam liputannya mengenai isu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Signifikansi penelitian ini terletak pada eksplorasi pendekatan Kompas.com dalam mengatasi tantangan menjaga kebebasan pers di Indonesia, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19 dan kebijakan PSBB di bawah pengaruh pemerintah. Dengan menggunakan analisis *framing* Robert Entman, penelitian ini mengkaji peran media dalam membentuk pandangan publik dan pengambilan keputusan selama krisis. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan tentang keseimbangan yang halus antara independensi media dan kontrol pemerintah, yang dapat menjadi model bagi organisasi media di Indonesia.

TINJAUAN KONSEPTUAL

Perspektif Sejarah Terkait Kebebasan Pers di Indonesia

Kebebasan pers merupakan isu penting sudah sejak lama menjadi perhatian di Indonesia. Ada klaim bahwa pemerintah pernah mencoba mengendalikan media dan bahwa telah terjadi insiden kekerasan terhadap jurnalis (*Indonesia Events of 2020, 2021; Leliana et al., 2021; Nasution, 2020; Wiratma, 2021*). Namun, masih banyak pula organisasi media lain di Indonesia yang masih tetap berupaya memberikan informasi yang akurat dan tidak bias kepada publik (Alhakim, 2022).

Media di Indonesia memainkan peran penting dalam memengaruhi opini publik dan wacana politik dari tahun 1945 hingga 1967 di bawah kepemimpinan Sukarno. Surat kabar dan majalah independen turut mendukung terciptanya keberagaman media dan keterbukaan multi-perspektif. Namun, pemerintah juga memiliki kontrol terhadap media untuk tujuan promosi dan menghilangkan kritik. Selain itu, Pemerintah juga melakukan penyensoran pada materi politik

dan ideologi yang dianggap berbahaya. Meskipun ada pembatasan-pembatasan ini, periode kepemimpinan Sukarno dianggap memiliki tingkat keberagaman dan kebebasan dan lebih tinggi dibandingkan dengan periode kepemimpinan Suharto (Anom, 2016).

Pemerintah sangat membatasi dan mengatur media selama periode kepemimpinan Suharto (1967–1998). Mayoritas media utama (*mainstream*) berada di bawah otoritas pemerintah. Pemerintah memanfaatkan media untuk mendukung tujuan politis dan menghilangkan kritik. Jurnalis independen mengalami kesulitan untuk memberitakan kritik terhadap pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya beberapa tantangan terkait sensorship, kekerasan, dan ancaman. Oleh karena itu, tingkat keterbukaan, akuntabilitas, dan kebebasan pers dikenal rendah pada masa tersebut (McWilliams, 2018).

Di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), kebebasan media di Indonesia masih belum sepenuhnya tercapai. Pemerintah telah berupaya untuk mempromosikan kemandirian media dan akses informasi dengan peraturan tentang informasi publik dan hak-hak jurnalis. Namun, pemerintah juga dihadapkan pada kritik terkait adanya pembatasan kebebasan media melalui sensorship, intimidasi, dan kekerasan fisik terhadap jurnalis sebagai tanggapan terhadap pemberitaan yang kritis. Terlepas dari adanya keberagaman outlet media independen dan media digital, Indonesia masih menghadapi kendala menuju kebebasan pers di bawah kepemimpinan Jokowi (Fealy, 2020; Ross Tapsell, 2015; Sukmayadi, 2019).

Media dan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah dipersepsikan secara beragam tergantung pada organisasi media, afiliasi politik atau pandangan editorialnya. Beberapa organisasi media cenderung menyajikan kebijakan pemerintah secara positif dan mengurangi kritik, sementara yang lain cenderung menyajikan perspektif yang lebih kritis dan investigatif (Li *et al.*, 2021; Yu & Chi, 2021). Perlu dilakukan studi banding pada beberapa organisasi media di Indonesia untuk menguji bagaimana organisasi-organisasi tersebut menyajikan kebijakan pemerintah, termasuk faktor-faktor seperti sumber informasi, nada pemberitaan dengan penggunaan bukti atau wawancara pendukung (Hidayat & Riauan, 2022; Lyu & Takikawa, 2022).

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah lanskap media di Indonesia secara signifikan. Hal ini telah menghasilkan pertumbuhan sumber-sumber media baru dan peningkatan yang signifikan terkait ketersediaan informasi. Akibatnya, sektor media mengalami persaingan yang semakin meningkat, dan pesaing-pesaing pasar baru menghadapi persaingan dari bisnis yang sudah ada. Namun, juga ada kekhawatiran tentang bagaimana perkembangan industri media digital dapat mempengaruhi kebebasan pers. Bisnis media menjadi semakin rentan terhadap tekanan dari pemerintah atau kelompok-kelompok berpengaruh karena mereka semakin bergantung pada platform-platform digital dan pendapatan dari iklan (Forbes, 2021; Wong, 2019). Di sisi lain, penyebaran propaganda dan informasi palsu secara online juga memunculkan kekhawatiran tentang kebenaran dan integritas media digital. Namun, revolusi media digital di Indonesia, dari segi cara penyampaian dan berinteraksi dengan masyarakat digital, lebih banyak memberikan peluang bagi kebebasan pers.

Analisis Pembingkai dari Robert Entman

Analisis pembingkai oleh Robert Entman adalah pendekatan yang banyak digunakan dalam penelitian ilmu komunikasi yang bertujuan untuk memahami bagaimana media membentuk persepsi dan opini publik. Pendekatan Entman didasarkan pada gagasan bahwa pembingkai (*framing*) media mempengaruhi cara orang menginterpretasi dan memahami peristiwa dan isu. Menurut Entman, bingkai (*frame*) adalah ide pusat atau alur cerita yang memberikan makna kepada suatu isu dengan menekankan beberapa aspek seraya mengurangi aspek lainnya. Dalam analisisnya, Entman mengidentifikasi empat komponen penting dari sebuah *frame*: pendefinisian masalah, diagnosa penyebab masalah, membuat penilaian moral,

dan menyarankan solusi (Clinton, 2022; Launa, 2020; Leliana et al., 2021). Pembingkai Entman mengacu pada bagaimana suatu isu didefinisikan atau dibingkai dalam hal penyebab, konsekuensi, dan aktor-aktor kunci. Perkiraan penyebab masalah (*diagnose causes*) merujuk pada penjelasan mengapa suatu isu penting atau relevan bagi khalayak. Tindakan merujuk pada solusi yang disarankan atau tindakan yang harus diambil untuk mengatasi isu tersebut. Evaluasi merujuk pada evaluasi positif atau negatif dari isu dan aktor yang terlibat.

Dengan memeriksa komponen-komponen ini, analisis pembingkai Entman membantu peneliti untuk mengidentifikasi dan membandingkan bingkai-bingkai yang berbeda yang digunakan oleh berbagai sumber media dalam menggambarkan suatu isu atau peristiwa tertentu. Pendekatan ini memberikan wawasan berharga tentang peran media dalam membentuk opini publik dan bagaimana bingkai-bingkai yang berbeda dapat memengaruhi persepsi dan keyakinan publik (Jaya & Syam, 2019).

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Analisis framing merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami bagaimana suatu isu atau peristiwa disajikan dalam berita dan bagaimana isu tersebut dibingkai oleh media (Wijoyo, 2023). Dalam konteks penelitian ini, analisis framing membantu dalam memahami bagaimana Kompas.com menyajikan dan membingkai isu PSBB yang melibatkan peran Pemerintah, LSM, ahli dan masyarakat.

Analisis framing Robert N. Entman juga digunakan sebagai alat utama dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana Kompas.com mengatasi kompleksitas hubungan antara media dan pemerintah dalam konteks kebijakan PSBB, serta bagaimana isu-isu penting terkait PSBB disajikan dalam berita.

Data

Data dalam penelitian ini mencakup 237 berita pada Kompas.com tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia, dari Maret 2020 hingga Desember 2021. Rentang waktu ini dipilih karena mencakup penyusunan kebijakan PSBB, pengesahannya secara resmi pada Maret 2020, dan pelaksanaannya, baik di tingkat pusat maupun daerah dari April hingga Agustus 2020. Pada September 2020, kebijakan PSBB dievaluasi dan diubah menjadi pendekatan yang lebih ketat dan berlanjut hingga Maret 2021, ketika tanda-tanda keberhasilan kebijakan tersebut mulai nampak. Perjalanan kebijakan PSBB selama setahun tersebut digambarkan dalam tiga tahap pemberitaan oleh Kompas.com, yang diterbitkan pada Maret, Oktober, dan Desember 2021, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Topik Berita pada Periode Penelitian

Periode	Topik Berita
Maret 2020	Wacana, perdebatan dan pengesahan kebijakan PSBB.
April – Mei 2020	Permasalahan-permasalahan teknis terkait penerapan PSBB.
Juni – Juli 2020	Kenaikan angka pasien terdampak Covid-19, polemik kebijakan PSBB dan Masa Transisi.
Agustus-Oktober 2020	Kontroversi kebijakan PSBB dan penolakan komunitas .
Desember 2020	Perpanjangan masa PSBB.
Juli 2021	Tekanan publik untuk tetap melanjutkan PSBB sehubungan dengan meningkatnya angka Covid-19.
Maret, Oktober dan Desember 2021	Kilas Balik PSBB.

Sumber: olahan peneliti

Penelitian ini tidak memasukkan berita dari awal tahun 2021 dikarenakan kurangnya relevansi dengan topik PSBB. Indonesia menghadapi gelombang kedua kasus COVID-19 pada awal tahun 2021, yang menyebabkan peningkatan fokus pada PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). PPKM lebih banyak disoroti secara lokal selama perayaan Tahun Baru, Natal, dan Idul Fitri. Akibatnya, sehingga data awal tahun 2021 dikeluarkan dari kajian dalam penelitian ini.

Sumber Berita

Penelitian ini mengkaji pemberitaan pada Kompas.com terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adapun sumber berita didapat dari Pemerintah, serta berbagai organisasi non-pemerintah (LSM), para ahli, dan masyarakat. Setelah berita selesai ditelaah, sumber-sumber berita sebagaimana yang dilaporkan oleh Kompas.com, diberi kode, kemudian dikelompokkan dan dihitung frekuensi kemunculannya.

Data Analysis

Analisis Pembingkai Robert N. Entman

Salah satu teknik *framing* populer yang digunakan untuk mengkaji berita adalah analisis *framing* Robert N. Entman. Analisis *framing* ini melihat bagaimana sebuah isu dan aspek-aspek realitas dipilih, ditekankan dan ditonjolkan. Proses seleksi isu mempertajam *framing* berita dan mempengaruhi penekanan isi berita. Agar data yang dianalisis lebih bermakna dan mudah diklasifikasikan, maka setiap berita dalam korpus berita diberi label dan kategori merujuk pada 4 komponen pembingkai Robert N. Entman yang meliputi: definisi, diagnosis, tindakan, dan evaluasi.

Pengorganisasian data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola mencakup beberapa tahap berupa: identifikasi pola, makna, konten, atau tema data. Data—yang berupa teks berita—yang diteliti kemudian dipetakan dalam bentuk tulisan atau simbol tertentu agar dapat diinterpretasi lebih lanjut. Langkah-langkah pemetaan dan pemberian kode mencakup: (1) familiarisasi data, (2) pembuatan kode awal, (3) penyempurnaan kode, (4) pencatatan kode, (5) pengulangan, dan (6) evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

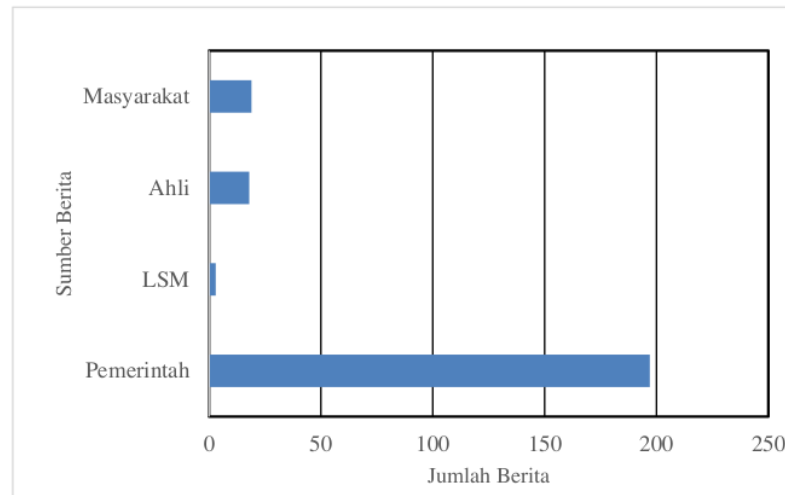
Sumber Berita

Berdasarkan data yang dikumpulkan per Maret 2020 hingga Desember 2021, Pemerintah adalah sumber berita utama terkait pemberitaan tentang PSBB yang mencakup 83,05% (197 dari 237) dari teks berita yang dianalisis. Sumber berita lainnya termasuk Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM (1, 265%), ahli (7,59%), dan komunitas masyarakat (8,01%), seperti yang ditunjukkan dalam Grafik 1. Ragam isu terkait PSBB yang dibahas dalam berita, mencakup aspek teknis dan prosedural, yang menonjolkan dominasi pemerintah sebagai sumber berita. Para jurnalis yang meliput kebijakan PSBB mengidentifikasi isu-isu penting seperti implementasi kebijakan, aturan-aturan dan penerapannya di wilayah-wilayah tertentu, kebijakan darurat sipil, bantuan sosial, dan masalah transportasi. Kompas.com menyajikan PSBB sebagai kebijakan yang dikendalikan, dikelola, dan dijalankan oleh pemerintah. Analisis berita ini, yang mengidentifikasi pemerintah sebagai sumber berita utama terkait penanganan COVID-19, konsisten dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya (Heychael & Rizky, 2020).

Tingkat dukungan kebijakan pemerintah terhadap PSBB di Indonesia terbagi dalam dua kelompok. Perspektif yang pro datang dari beberapa LSM, ahli, dan anggota masyarakat yang mendukung kebijakan tersebut. Sedangkan perspektif yang kontra, menyoal efektivitas PSBB. Namun, LSM juga menyoroti adanya pelanggaran hak asasi manusia, keraguan masyarakat

terkait kemampuan PSBB dalam mengendalikan penyebaran COVID-19, dan masalah prosedural yang muncul selama pelaksanaan PSBB di Bandara Soekarno-Hatta. Para ahli dari berbagai bidang, termasuk hukum, jurnalistik, peneliti, akademisi, kesehatan masyarakat, epidemiologi, dan kedokteran, memberikan sudut pandang mereka tentang legalitas dan dampak sosial pelaksanaan PSBB.

Grafik 1. Sumber Berita pada Korpus Berita Terkait PSBB



Analisis Framing

Mendefinisikan Masalah (*Define Problem*)

Pembingkaihan Entman mengacu pada bagaimana suatu isu didefinisikan atau dibingkai dalam hal penyebab, konsekuensi, dan aktor-aktor kunci. Dalam penelitian ini, sebanyak 237 artikel berita terkait PSBB menjadi fokus utama analisis pembingkaihan. Seleksi isu berfokus pada topik-topik mengenai; Pemberlakuan PSBB, Definisi Hukum & Ketentuan, Penerapan PSBB di Daerah, Urgensi PSBB, Darurat Sipil, Bantuan Sosial, dan Transportasi. Tabel 2 di bawah ini menunjukkan kaitan sumber berita beserta frekuensi topik-topik yang diberitakan.

Sebanyak 160 berita dengan seleksi isu 'Pemberlakuan PSBB', dominasi terbanyak bersumber dari Pemerintah (124 berita), disusul sumber dari LSM (3 berita), dari ahli (17 berita) dan komunitas masyarakat (16 berita). Terdapat 20 berita dengan isu Definisi Hukum dan Ketentuan PSBB yang keseluruhannya bersumber dari Pemerintah. Kondisi yang sama pada 32 pemberitaan dengan isu 'Penerapan PSBB di Daerah' keseluruhannya pun bersumber dari Pemerintah. Terdapat 4 berita dengan isu terkait 'Urgensi PSBB', 2 berita bersumber dari Pemerintah, 1 dari ahli dan 1 dari komunitas masyarakat. Sebanyak 4 berita terkait Darurat Sipil bersumber dari pemerintah (2), ahli (1) dan komunitas masyarakat (1). Sedangkan 3 berita terkait 'Bantuan Sosial', bersumber dari Pemerintah (2) dan komunitas masyarakat (1) serta 14 berita terkait 'Transportasi' dimana Pemerintah menjadi sumber utama pemberitaan pada keseluruhan berita.

Tabel 2. Sumber Berita dan Pemilihan Isu

Seleksi Isu	Pemerintah	LSM	Ahli	Komunitas Masyarakat	Jumlah
Pemberlakuan PSBB	124	3	17	16	160
Definisi Hukum dan Ketentuan	20	0	0	0	20

Penerapan PSBB di Daerah	32	0	0	0	32
Urgensi PSBB	2	0	1	1	4
Darurat Sipil	2	0	1	1	4
Bantuan Sosial	2	0	0	1	3
Transportasi	14	0	0	0	14
Jumlah	196	3	19	19	237
					Total

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 2, isu pemberitaan terkait PSBB, tidak menonjolkan aktor-aktor kunci seperti; LSM, ahli dan masyarakat. PSBB diwarnai oleh dominasi Pemerintah yang memiliki peran yang signifikan dalam isu 'Pemberlakuan PSBB' dengan 124 berita. LSM memberikan kontribusi yang terbatas terkait isu tersebut. Para ahli dari kalangan dokter, akademisi dan hukum juga berkontribusi dalam isu 'Pemberlakuan PSBB' (17 berita) dan 'Urgensi PSBB' (1 berita) sebagai sumber pandangan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang PSBB. Terdapat tanggapan dan perspektif masyarakat yang tidak dominan dalam seleksi isu yang dibawakan oleh Kompas.com, termasuk isu 'Definisi Hukum dan Ketentuan PSBB' serta 'Penerapan PSBB di Daerah' yang secara dominan bersumber dari pemerintah. Hal ini menunjukkan kontrol yang kuat dari pemerintah dalam mengkomunikasikan informasi terkait regulasi dan pelaksanaan PSBB. Disisi lain, isu 'Urgensi PSBB', 'Darurat Sipil', 'Bantuan Sosial' dan 'Transportasi' memiliki kontribusi dari berbagai sumber, termasuk pemerintah, ahli, dan komunitas masyarakat, menunjukkan keragaman perspektif yang relatif minor.

Kompas.com membingkai kebijakan PSBB sebagai inisiatif dan tindakan yang sangat didominasi dan dipengaruhi oleh pemerintah. Kontribusi berbagai sumber di luar Pemerintah seperti; LSM, Ahli dan Masyarakat ditonjolkan secara terbatas sebagai keragaman perspektif.

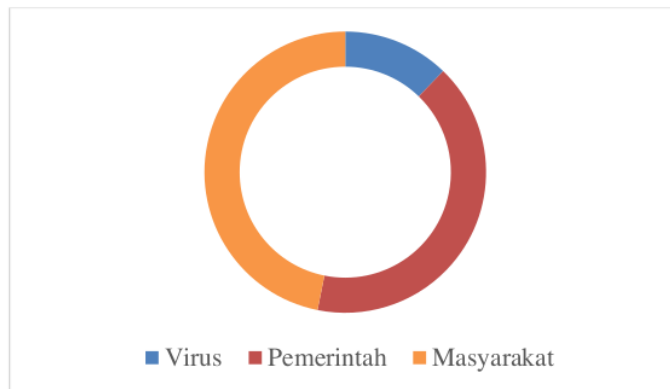
Diagnosa Penyebab Masalah (*Diagnose Causes*)

Elemen kedua dalam analisis pembedaan Robert N. Entman adalah diagnosa penyebab masalah (*diagnose cause*) yang bertujuan melihat siapa yang menjadi penyebab dari suatu peristiwa yang meliputi 'apa' (*what*) dan juga 'siapa' (*who*). Masalah yang dipahami secara berbeda, akan menyebabkan penyebab masalah dipahami secara berbeda pula.

Pemberitaan terkait PSBB lebih banyak membingkai permasalahan berkaitan dengan pemberlakuan kebijakan tersebut ke masyarakat alih-alih membahas virus Covid-19. Oleh karena itu, virus Covid-19 bukan lagi mendominasi pemberitaan terkait PSBB. Virus Covid-19 menjadi penyebab masalah hanya pada 29 berita, sedangkan Pemerintah sebagai aktor kunci sekaligus penyebab masalah ada dalam 97 berita. Masyarakat mendominasi penyebab masalah dalam pembedaan kebijakan PSBB dalam 111 berita (Grafik 2).

Pembedaan ini menunjukkan bahwa dalam pemberitaan terkait PSBB, perhatian utama tertuju pada peran masyarakat (*who*) dalam implementasi dan dampak kebijakan PSBB, dan bahwa masyarakat dianggap sebagai penyebab utama dari permasalahan yang dibahas dalam berita tersebut. Polemik mewarnai semua berita dari Maret 2020 hingga Desember 2021 sehubungan dengan pelaksanaan PSBB oleh pemerintah hingga masyarakat, pelanggaran masyarakat, dan hambatan teknis yang dihadapi masyarakat terkait penerapan aturan PSBB (*what*).

Grafik 2. Penyebab Masalah Dalam Pemberitaan PSBB



Membuat Penilaian Moral (*Make Moral Judgement*)

Berdasarkan konteks berita terkait PSBB yang disajikan, Kompas.com tidak secara eksplisit membuat penilaian moral. Namun, penilaian moral diindikasikan melalui pembingkai berita dan penyajian solusi-solusi yang cenderung positif dalam pemberitaan tentang isu PSBB. Kompas.com cenderung mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan PSBB dan menekankan pentingnya mematuhi aturan-aturan PSBB. Hal ini merupakan penilaian moral yang mengedepankan aspek ketaatan terhadap peraturan dan dukungan terhadap tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi wabah COVID-19.

Dari pembingkai berita yang cenderung positif, Kompas.com lebih mengedukasi dan mendukung aturan-aturan PSBB, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, hal ini dianggap sebagai penilaian moral yang mendukung nilai-nilai kesejahteraan masyarakat dan upaya untuk mengendalikan penyebaran virus. Namun, penting untuk diingat bahwa penilaian moral adalah interpretasi yang subjektif, dan hal ini bisa berbeda-beda antara organisasi media. Penilaian moral juga tergantung pada perspektif etika dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan media itu sendiri. Dalam konteks ini, Kompas.com cenderung memberikan pembingkai yang mengedepankan aspek positif dan dukungan terhadap kebijakan PSBB, yang bisa dianggap sebagai penilaian moral yang bersifat implisit.

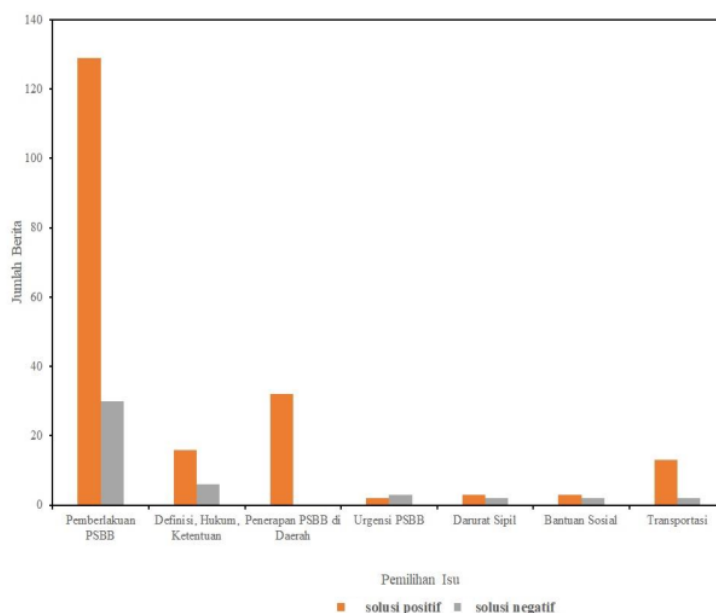
Menyarankan Solusi (*Treatment Recommendation*)

Pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan PSBB pada Maret 2020 sebagai tanggapan terhadap wabah COVID-19. Mayoritas pemberitaan Kompas.com terkait isu PSBB menekankan pada pembingkai yang positif terhadap kebijakan Pemerintah tersebut. Kompas.com membingkai PSBB sebagai sebuah aturan yang perlu diketahui oleh masyarakat dengan lebih mengedepankan aspek-aspek teknis dan edukatif terkait pemberlakuan PSBB, definisi, hukum dan ketentuan PSBB. Dalam porsi yang sangat kecil, Kompas.com juga mengangkat perspektif berbeda sebagai kritik terhadap implementasi kebijakan PSBB dari LSM, ahli dan masyarakat. Namun secara keseluruhan Kompas.com lebih cenderung menyajikan sentiment positif terkait kebijakan Pemerintah tersebut.

Solusi yang ditawarkan oleh Kompas.com adalah pendekatan yang lebih terpusat pada pemahaman dan pembingkai yang lebih holistik tentang PSBB yang mencakup; ketersediaan ruang bagi perspektif berbeda, analisis yang lebih mendalam, edukasi masyarakat dengan memperbanyak informasi teknis, serta mendorong dialog dan diskusi dengan menyajikan perspektif dari LSM dan ahli.

Grafik 3 kecenderungan Kompas.com dalam membingkai solusi bagi pembaca. Dari 237 berita yang dikaji dalam penelitian ini, terdapat dua kecenderungan utama terkait solusi yang disarankan oleh Kompas.com. Solusi yang pertama adalah solusi positif yaitu dengan memahami aturan main PSBB dan tetap memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diperkuat dengan pandangan ahli. Kemudian solusi yang cenderung ke arah negatif dengan melihat kelemahan dan ketidakteraturan penerapan PSBB di masyarakat. Penelitian ini memetabolisasi kecenderungan pola yang dimainkan oleh Kompas.com sebagaimana terdapat pada Grafik 3, dimana dalam setiap pemilihan isu terkait PSBB, Kompas.com selalu membawa kepada solusi positif alih-alih solusi negatif.

Grafik 3. Arah Pembingkai Solusi oleh Kompas.com Terkait Pembingkai PSBB



Pada grafik tersebut terlihat bahwa Kompas.com lebih banyak menekankan solusi positif terhadap publik dalam setiap pemilihan isu. Bahkan pada isu 'Penerapan PSBB di Daerah' Kompas.com hanya memberikan solusi positif secara mutlak dibandingkan dengan isu-isu lain dimana masih terdapat porsi menuju ke arah negatif. Dalam pelaporan beritanya, Kompas.com lebih cenderung untuk memberikan pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan PSBB daripada menyoroti kekurangan atau masalah yang muncul dalam penerapannya.

Bagaimana Kompas.com Menyeimbangkan Kebebasan Pers dan Kontrol Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis framing, penelitian ini mengeksplorasi pendekatan Kompas.com dalam menyeimbangkan kebebasan pers di Indonesia dalam beberapa aspek penting sebagai berikut;

- (1) Fokus pada informasi dan pendidikan: Kompas.com cenderung fokus pada penyediaan informasi yang mendalam terkait PSBB, yang mencakup aturan-aturan, definisi, hukum, dan ketentuan PSBB. Ini dapat dianggap sebagai upaya pendidikan masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan-aturan PSBB dan memahami isu tersebut dengan baik.
- (2) Pembingkai yang positif: Dalam pembingkai beritanya, Kompas.com cenderung memilih solusi yang lebih positif dengan mengedepankan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini bisa dianggap sebagai upaya untuk menjaga hubungan yang seimbang

dengan pemerintah, menghindari konflik yang mungkin timbul, dan meminimalkan potensi hambatan terhadap kebebasan pers.

- (3) Pembatasan terhadap perspektif berbeda: Meskipun ada pengakuan terhadap perspektif berbeda dan kritik dari LSM, ahli, dan masyarakat terhadap pelaksanaan PSBB, peminimalan berita secara umum cenderung positif dan terbatas. Ini bisa dianggap sebagai usaha untuk menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah dan menghindari konflik.
- (4) Penekanan pada pandangan ahli: Kompas.com sering mengedepankan pandangan ahli dalam peminimalan berita terkait isu PSBB, yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kebijakan PSBB. Ini bisa dianggap sebagai upaya untuk memberikan informasi yang akurat dan berbobot kepada pembaca.

Secara keseluruhan Kompas.com berusaha menjaga keseimbangan antara memberikan informasi yang akurat, mendukung kebijakan pemerintah, dan menghindari konflik. Ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara media dan pemerintah di Indonesia, di mana kebebasan pers harus dijalankan dengan mempertimbangkan faktor-faktor politik dan sosial yang ada dalam lingkungan tersebut.

SIMPULAN

Kompas.com mengadopsi pendekatan yang berfokus pada penyediaan informasi dan pendidikan kepada masyarakat terkait kebijakan PSBB dengan cenderung memberikan peminimalan berita yang lebih positif terkait PSBB, dan mengedepankan dukungan terhadap kebijakan pemerintah serta pemahaman terhadap aturan-aturan PSBB. Meskipun ada pengakuan terbatas terhadap perspektif berbeda dan kritik terhadap pelaksanaan PSBB, peminimalan berita umumnya cenderung positif.

Kompas.com seringkali menekankan pandangan ahli dalam berita mereka, yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan PSBB. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk memberikan informasi yang akurat dan berbobot kepada pembaca. Dalam keseluruhan pendekatan mereka, Kompas.com berupaya menjaga keseimbangan antara memberikan informasi yang akurat, mendukung kebijakan pemerintah, dan menghindari konflik yang mungkin timbul. Ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara media dan pemerintah di Indonesia, di mana kebebasan pers harus dijalankan dengan mempertimbangkan faktor-faktor politik dan sosial yang ada dalam lingkungan tersebut.

5

Ucapan Terima Kasih

Para penulis berterima kasih kepada Universitas Pancasila, Indonesia, atas dukungan yang diberikan melalui dana penelitian internal.

REFERENSI

- Adi, A., & Stoeckle, T. (2021). Public Relations and Communications during the Covid-19 Pandemic. *ESSACHESS*, 4, 7–14.
- Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 89–106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>
- Anom, E. (2016). *Pemerintah, media dan masyarakat di Indonesia*. Penerbit Andi.
- Benecke, D. R. (2021). The Role of the Global Capability Framework within the Strategic Communication Profession in an Emerging Post COVID-19 Context: A South African Perspective. *ESSACHESS*, 14(1), 137–159.
- Clinton, M. (2022). Storylines, metaphors, and solutions in the work-readiness literature: A frame analysis. *Nurse Education Today*, 119. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105593>

- Fealy, G. (2020). Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 301–323. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1846482>
- Forbes, C. (2021). The Changing Role and Status of UK Government Communication during the Covid-19 Crisis. *ESSACHESS*, 14(2), 33–57.
- Heychael, M., & Rizky, A. (2020). *Lumpuh dalam Cengkeraman Cukong: Televisi dan Pemberitaan UU Cipta Kerja*. <https://www.Remotivi.or.Id/Headline/Esai/643>.
- Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2022). ANALISIS FRAMING KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI MEDIA ONLINE CNN INDONESIA. *Medium*, 9(2), 167–184. [https://doi.org/10.25299/medium.2021.vol9\(2\).8519](https://doi.org/10.25299/medium.2021.vol9(2).8519)
- Indonesia Events of 2020. (2021). <https://www.Hrw.Org/World-Report/2021/Country-Chapters/Indonesia#5b498e>.
- Jaya, D. E., & Syam, H. (2019). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi E-KTP Oleh Setya Novanto di Cnnindonesia.com dan Viva.co.id. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4(3).
- Junius Fernando, Z., Pujiyono, Rozah, U., & Rochaeti, N. (2022). The freedom of expression in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>
- Kusnadi, I. H., & Dian Hikmawan, M. (2020). Digital Cohesion in Era of Pandemic COVID-19 in Indonesia. *International Journal of Engineering Research and Technology*, 13(7), 1775. <https://doi.org/10.37624/IJERT/13.7.2020.1775-1779>
- Launa, L. (2020). ROBERT ENTMAN FRAMING ANALYSIS OF PRABOWO SUBIANTO'S IMAGE IN REPUBLIKA.CO.ID MARCH – APRIL 2019 EDITION. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 3(1), 50–64. <https://doi.org/10.17933/diakom.v3i1.57>
- Leliana, I., Herry, H., Suratriadi, P., & Enrieco, E. (2021). Analisis Framing Model Robert Entman tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBCIndonesia.com. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 21(1), 60–67. <https://doi.org/10.31294/jc.v21i1.10042>
- Li, Y., Shi, H., & Zhou, Y. (2021). The influence of the media on government decisions: Evidence from IPOs in China. *Journal of Corporate Finance*, 70, 102056. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.102056>
- Lyu, Z., & Takikawa, H. (2022). Media framing and expression of anti-China sentiment in COVID-19-related news discourse: An analysis using deep learning methods. *Heliyon*, 8(8), e10419. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10419>
- McWilliams, E. (2018). *Democracy in Indonesia: A Progress Report*. <https://Afsa.Org/Democracy-Indonesia-Progress-Report>.
- Moernaut, R., Mast, J., & Temmerman, M. (2019). All climate stories worth telling. Salience and positionality at the intersection of news values and frames. *Discourse, Context & Media*, 28, 93–111. <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2018.10.004>
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *ADALAH*, 4(3). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Ross Tapsell. (2015). Indonesia's Media Oligarchy and the "Jokowi Phenomenon." *Indonesia*, 99, 29. <https://doi.org/10.5728/indonesia.99.0029>
- Sukmayadi, V. (2019). The Dynamics of Media Landscape and Media Policy in Indonesia. *Asia Pacific Media Educator*, 29(1), 58–67. <https://doi.org/10.1177/1326365X19844853>
- Wijoyo, S. G. (2023). Analisis Framing Robert Entman Tentang Kasus Kejahatan Anak Di Bawah Umur. 2(1), 47–53.
- Wiratma, M. (2021). Ancaman Kebebasan Pers di Era Internet. Media Indonesia. <https://Mediaindonesia.Com/Opini/404360/Ancaman-Kebebasan-Pers-Di-Era-Internet>.

- Wong, E. (2019). How Indonesians embrace the digital world.
<https://www.thejakartapost.com/academia/2019/03/18/how-indonesians-embrace-the-digital-world.html>.
- Yu, Y., & Chi, J. (2021). Political embeddedness, media positioning and corporate social responsibility: Evidence from China. *Emerging Markets Review*, 47, 100799.
<https://doi.org/10.1016/j.ememar.2021.100799>

MEMBINGKAI KEBIJAKAN PSBB: ANTARA KEBEBASAN PERS DAN KONTROL PEMERINTAH

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

1%

2

Submitted to UIN Ar-Raniry

Student Paper

<1%

3

journal.moestopo.ac.id

Internet Source

<1%

4

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1%

5

ojs.unud.ac.id

Internet Source

<1%

6

www.airman7.com

Internet Source

<1%

7

Denune Gentastilar Wangsemukti, Nasrullah Nasrullah. "Konstruksi Media Online Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) COVID-19 DKI Jakarta", Jurnal Spektrum Komunikasi, 2021

Publication

<1%

8	emakalah.wordpress.com Internet Source	<1 %
9	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
10	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
11	rianu2006.wordpress.com Internet Source	<1 %
12	www.digilib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.smpnegeri1cibinong.sch.id Internet Source	<1 %
14	Rahmat Saputra. "Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia", KRTHA BHAYANGKARA, 2020 Publication	<1 %
15	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On